



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	2
1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
2.1	Tujuan Evaluasi Renja	4
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II	4
BAB III	RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	9
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022	9
BAB IV	PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top down/bottom up.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renja SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang serta memberikan fasilitas suatu program dan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah juga memiliki kewajiban menyusun rencana kerja daerah Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Langkat merupakan rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Langkat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja tahun 2022 BPKAD Kabupaten Langkat adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2022 BPKAD Kabupaten Langkat.

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 5 (lima) Bupati Kabupaten Langkat.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja BPKAD Kabupaten Langkat adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. TUJUAN EVALUASI

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II
TAHUN 2022

2.1. Tujuan Evaluasi Renja

Tujuan dilakukannya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 antara lain untuk :

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan.
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang ditetapkan.
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan.
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD.
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II

Sampai dengan Triwulan II ini, hasil Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk BPKAD adalah sebagai berikut :

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
 Rencana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat
 Periode Pelaksanaan s.d Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran	Kode Rincian	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Kegiatan/ Output)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akte Periode Rencana Perangkat Daerah)		Maksimal Capaian Kinerja/ Maksimal Perangkat Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Pencapaian Kinerja/ Maksimal Anggaran Perangkat Daerah yang dianggarkan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dianggarkan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah (s.d Triwulan II Tahun 2022)		Tingkat Pencapaian Kinerja/ Maksimal Anggaran Perangkat Daerah (s.d Triwulan II Tahun 2022)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			UNSUB PERENCANAAN PERENCANAAN														
			KEUANGAN														
			Program Penunjang Unsur														
			Administrasi Keuangan														
			Perangkat Daerah														
			ASN														
			Penyediaan Administrasi														
			Pelebaran Tugas ASN														
			5 02 01 3.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Buku laporan Keuangan Akhir Tahun, Ilm Counter Part Pemkab. Langkat, buku laporan keuangan lain tahunan	100%	1.264.335.800	100%	571.088.036	100%	426.774.825	20	55.922.000	30	42.401.603	50	98.323.603
			5 02 01 3.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester dan SKPD	Terselenggaranya Laporan Bulanan Seluruh SKPD	60	353.879.100	100%	120.000.000	100%	193.354.593	3	13.050.000	-	-	3	13.050.000
			5 02 01 3.02 09	Pengadaan Pakan Dinas Berbasis Akutif Kelengkapannya	Terselenggaranya pelayanan dinas pegawai BPKAD Kab. Langkat, Terselenggaranya pelayanan hari-hari tertentu guna keberagaman	86	250.691.982	93	106.780.000	93	102.920.000	93	92	93	93	93	93
			5 02 01 3.02 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya pengiriman staf BPKAD untuk mengikuti kursus/bentek tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah	5	628.098.500	1	625.065.000	1	368.980.000	0,25	108.860.000	-	-	0,3	108.860.000
			5 02 01 3.02 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terdakluarnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	10	383.588.039	1	333.394.310	1	347.914.916	-	-	-	-	0	347.914.916
			5 02 01 3.02 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terdakluarnya Bimtek Peraturan Perundang-undangan	6	359.386.000	2	1.091.031.537	2	1.016.641.353	-	-	1	1	1	1.016.641.353
			5 02 01 3.02 11	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
			5 02 01 3.02 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan elektronik serta listrik BPKAD	5	45.553.678	1	9.431.535	1	10.352.253	-	-	0	0	0	10.352.253
			5 02 01 3.02 02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Terdakluarnya pengadaan alat tulis kantor	5	195.388.840	1	190.514.516	1	143.576.559	0,25	37.789.050	-	-	0,3	37.789.050
			5 02 01 3.02 03	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Terdakluarnya pengadaan peralatan rumah tangga kantor BPKAD	5	79.689.107	1	44.064.398	1	49.573.897	-	-	0	0	0	49.573.897

No	Saluran	Kode rekening	Progress kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome / kegiatan / output)	Target Realisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Miliar Periode Realisasi Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Miliar Periode yang direalisasi)	Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Tahun 2024 (Miliar Periode yang direalisasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah yang direalisasi (Miliar Periode)			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah (%)	Realisasi Konsep dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah (Miliar Periode)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah (Miliar Periode)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah (Miliar Periode)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah (Miliar Periode)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah (Miliar Periode)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah (Miliar Periode)		
							K	Rp	M	K	Rp	M								K	Rp
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.02.01	2.06.04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	60	36.300.000	1 Tahun	36.300.000	0,35	2.950.000	-	0,3	2.950.000	35,00	B	0,3	35.250.000	81,34			
5.02.01	2.06.05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Terlaksananya kebutuhan cetakan dan pengiriman kantor BIKAD	5	111.191.000	1 Tahun	45.773.300	0,35	46.031.500	0,35	0,5	91.815.000	50,00	B	0,5	303.915.000	226,35			
5.02.01	2.06.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pembelian surat kabar/jurnal dan buku peraturan perundang-undangan	5	122.519.400	1 Tahun	91.568.376	-	-	-	0	-	-	-	0	91.568.376	181,41			
5.02.01	2.06.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah untuk kepentingan koordinasi, konsultasi dan studi banding	5	1.449.459.000	1 Tahun	710.000.000	0,35	262.519.537	0,25	0,5	579.179.737	50,00	B	0,5	1.299.179.737	89,63			
5.02.01	2.07	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyulung Ususan Pemerintahan Daerah																		
5.02.01	2.07.02	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	10	31.851.000	1 Unit	31.851.000	-	-	-	0	-	-	-	0	31.851.000	42,50			
5.02.01	2.07.05	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja kerja, kursi, lemari dan filing kabinet	20	41.873.260	43 Unit	12.552.350	30	35.000.000	30	30	35.000.000	71,43	#DIV/0!	30	156.557.350	373,88			
5.02.01	2.07.06	06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan perlatan gedung kantor	36	399.809.108	29 Unit	210.270.880	2	35.000.000	-	2	35.000.000	6,00	30	2	265.270.880	66,35			
5.02.01	2.07.10	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4	441.038.164	10 Unit	78.414.247	8	14.400.000	-	8	14.400.000	50,00	11	8	89.814.247	20,36			
5.02.01	2.08	08	Penyediaan Jasa Penyulung Ususan Pemerintahan Daerah																		
5.02.01	2.08.01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, air, telepon dan internet	60	899.298.727	12 Bulan	292.879.996	3	34.663.249	3	6	39.663.249	50,00	13	6	332.543.245	37,51			
5.02.01	2.08.04	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran pegawai honorarium tetap	60	542.290.000	13 Bulan	501.435.400	3	65.404.999	3	6	66.250.000	46,75	27	6	638.110.399	117,57			
5.02.01	2.09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyulung Ususan Pemerintahan Daerah																		
5.02.01	2.09.02	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan (dan perawatan kendaraan dinas / operasional, terlaksananya service dan belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional)	5	786.000.140	1 Tahun	799.600.000	0,25	10.818.894	0,25	0,5	70.818.894	50,00	15	0,5	870.418.894	110,74			
5.02.01	2.09.06	06	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan perabotan kantor BIKAD	60	118.840.800	1000	60.980.000	35	1.900.000	-	35	1.900.000	25,00	3	35	62.880.000	48,80			
5.02.01	2.09.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya jaminan aset bergerak dan tidak bergerak milik Pemkab, Langkat, Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BIKAD	5	515.993.303	1 Tahun	300.000.000	0,25	98.660.000	0,25	0,5	98.660.000	50,00	18	0,5	398.660.000	77,27			
5.02.02	2.01	01	Program Pengabdian Masyarakat																		
5.02.02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																		
5.02.02	2.01.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPA	Terlaksananya KUA dan PPA TA. 2022 Kab. Langkat	5	568.095.396	1 Kegiatan	242.472.719	-	-	-	0	-	-	0	242.472.719	43,56				
5.02.02	2.01.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPA	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD Kab. Langkat	5	452.715.533	1 Kegiatan	245.625.800	-	-	-	0	-	-	0	245.625.800	54,26				
5.02.02	2.01.03	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD Kab. Langkat	5	345.206.260	1 Kegiatan	131.208.145	-	-	-	0	-	-	0	131.208.145	37,99				
5.02.02	2.01.04	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya verifikasi Perubahan RKA Kab. Langkat	5	345.206.260	1 Kegiatan	606.266.050	0,25	5.744.500	-	0,3	5.744.500	25,00	1	0,3	613.110.500	175,34			
5.02.02	2.01.05	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya verifikasi DPA SKPD Kab. Langkat	5	568.065.396	1 Kegiatan	277.275.497	0,25	65.207.808	-	0,3	65.207.808	25,00	24	0,3	330.831.461	58,24			

No	Sumber	Kode Rekening	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Rencana Perangko Daerah pada Tahun 2021 (Alokasi Perangko Rencana Perangko Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangko Daerah (Realisasi Perangko Daerah)		Sasaran Kinerja dan Kegiatan Rencana Perangko Daerah Tahun 2021 (Realisasi Perangko Daerah yang direalisasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangko Daerah yang direalisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangko Daerah yang direalisasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangko Daerah yang direalisasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangko Daerah (2021-2022)		Jumlah Perangko Daerah yang dianggarkan		
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K			Rp	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
5 01 01 2.01 06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya verifikasi Perubahan DPA Kab. Langkat	5	454.219.333	1	635.265.589	1 Kegiatan	645.173.080	0,25	64.312.850	0,3	62.312.850	25,00	50	0,3	707.485.930	156,28		
5 02 01 2.01 07			Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Langkat dan terselenggaranya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Langkat TA. 2022	5	265.476.347	2	1.433.461.346	2 Kegiatan	940.509.645	-	-	0	-	-	0	0	940.509.645	354,27		
5 01 01 2.01 08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terselenggaranya Perda APBD Kab. Langkat, terselenggaranya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Langkat	5	184.603.404	2	560.613.471	2 Kegiatan	956.068.460	0,25	65.380.000	0,25	33.897.000	25,00	18	0,5	1.055.345.460	371,69		
5 01 01 2.01 09			Koordinasi dan Pengalokasian Perencanaan Daerah	Terselenggaranya laporan rekonstruksi Kas Daerah	5	270.194.350	1	97.070.370	1 Tahun	90.396.480	0,25	28.300.000	0,25	14.839.200	50,00	55	0,5	143.475.680	53,08		
5 02 01 2.01 01			Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerimaan Anggaran Kas dan SPD	Terselenggaranya penerimaan dan pencairan APBD	0	-	1	49.398.889	1 Tahun	38.037.690	0,25	20.337.690	-	20.337.690	25,00		0,3	58.375.380	#DIV/0!		
5 02 01 2.01 05			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya ke Kementerian Keuangan dan Kementerian teknis	5	570.979.688	1	249.746.809	1 Tahun	159.947.771	0,25	73.466.000	0,25	32.727.900	50,00	23	0,5	326.141.671	317,85		
5 02 01 2.01 07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perimbangan Etahak Kerjasama (PKS)	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta dan tersedianya laporan berita acara rekonstruksi pajak dengan KPP dan KPPN	0	-	1	257.001.068	1 Tahun	160.016.875	-	48.872.000	0,3	48.872.000	25,00	19	0,3	308.888.875	#DIV/0!		
5 02 01 2.01 09			Rekonstruksi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemupukan dan Pemotongan Pembinaan Perencanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan bulanan seluruh SKPD	5	307.877.500	1	339.939.456	1 Tahun	202.249.500	-	-	0	-	-	0	0	202.249.500	65,69		
5 02 01 2.01 11			Pembinaan Perencanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya FGD membahas Penjabaran ke lebih lanjut dan DAK Fisik, Dana Desa dan Dana Kelurahan	5	276.269.350	1	533.318.415	1 Tahun	472.309.560	0,3	347.748.894	0,25	31.837.000	50,00	73	0,5	851.895.454	308,36		
5 02 01 2.01 03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	791.859.671	100	597.497.821	100%	383.796.780	-	-	0	-	-	0	0	383.796.780	48,47		
5 02 01 2.01 07			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelidikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerjasama Daerah	Tersedianya laporan penyelesaian tunggutan daerah	10	659.216.658	100	152.298.694	100%	150.653.977	-	-	0	-	-	0	0	150.653.977	22,85		

No	Sasaran	Kode Indikator	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (ukuran y kegiatan/output)	Target Kinerja dan Anggaran Biaya Peringkat Daerah Tahun 2024 (Miliar Rupiah)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Peringkat Daerah yang direvisasi (Miliar Rupiah)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Peringkat Daerah yang direvisasi (Miliar Rupiah)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya Peringkat Daerah (Miliar Rupiah Tahun 2024)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Peringkat Daerah (Miliar Rupiah 2024)		Unit Peringkat Daerah Pemeringkat (Jumlah)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5 02 03 2.03	10	10	10	Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten	5	570.979.688	1	54.360.138	0	0	0	54.360.138	0	54.360.138	5
5 02 03 2.04	08	08	08	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Daerah	340	409.490.823,011	1	338.422.209,100	0,3	74.094.658,500	22	25,010	22	25,010	101,093
5 02 03 2.04	09	09	09	Terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	3	10.047.615,453	1	11.128.741,320	0,25	494.500.000	0,25	50,000	24	55.144.590,520	130,90
5 02 03 2.04	10	10	10	Jumlah Dana Bagi Hasil yang Dibebaskan	240	5.573.344,301	1	4.656.977,935	0	0	0	0	0	4.656.977,935	83,57
5 02 03	09	09	09	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	227.077,014	1	225.994.577	0,25	8.000.000	0,25	8.000.000	0,5	16.000.000	400,007
5 02 03 2.01	01	01	01	Terlaksananya dokumen standar satuan harga	5	335.474.750	1	337.068.390	0,3	152.806.972	0,25	24.420.000	0,5	138.226.972	141,21
5 02 03 2.01	07	07	07	Terlaksananya pengimanan asset Pemda dan terdistribusinya pembuktian sertifikat tanah milik Pemda, pelaksanaan dan penghapusan BMD	5	106.796.800	1	98.855.570	0	0	0	0	0	98.855.570	73,34
5 02 03 2.01	11	11	11	Terlaksananya pemutakhiran data asset dan sensus BMD	5	764.593.341	1	246.377.420	0,25	43.300.000	0,25	30.000.000	0,5	73.300.000	41,77
Buku-rata capaian kinerja (3)															
Faktor pemborong keberhasilan kinerja:															
Faktor pengganggu pencapaian kinerja:															
Trend lanjut yang diperlukan dalam rangka Peringkat Daerah Kabupaten berikutnya*):															
Trend lanjut yang diperlukan dalam rangka Peringkat Daerah Kabupaten berikutnya*):															
*) Ditir oleh Kepala Bappeda															

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama semester I dan dengan mempertimbangkan adanya situasi luar biasa adanya pandemi Covid 19 maka dilakukan beberapa perubahan dalam anggaran TA 2022 dengan rincian seperti pada tabel perubahan yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

UNIT ORGANISASI : BPKAD KABUPATEN LANGKAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas
			Target 2022		Pagu Indikatif		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				375.019.703.272	378.106.073.825	
5 02	KEUANGAN				375.019.703.272	378.106.073.825	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		100%	100%	12.965.201.107	16.809.742.445	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	100%	100%	7.534.099.881	7.650.240.781	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	12 Bulan	6.402.529.782	6.402.529.782	
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa yang dibayarkan untuk pengelola keuangan	12 Bulan	12 Bulan	511.540.682	555.100.682	
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun kabupaten	54 OPD	54 OPD	426.774.825	499.355.725	
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	54 OPD	54 OPD	193.254.592	193.254.592	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi pegawai	100%	100%	1.736.457.268	1.410.664.268	
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	90 stel	90 stel	102.920.000	102.920.000	
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN	35 Orang	40 Orang	368.980.000	418.980.000	
5 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	54 OPD	54 OPD	247.914.916	247.914.916	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-undangan	54 OPD	54 OPD	1.016.642.352	640.849.352	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.264.486.085	1.731.534.585	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Telaah Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas
			Target 2022		Pagu Indikatif		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang digunakan	8 Jenis	8 Jenis	10.357.253	10.357.253	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dipergunakan	32 Jenis	32 Jenis	143.576.559	143.576.559	
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah barang terpakai	26 Jenis	26 Jenis	49.573.897	49.573.897	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	36.300.000	36.300.000	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang di cetak	20 Jenis	20 Jenis	212.110.000	212.110.000	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	92.568.376	109.616.876	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	720.000.000	1.170.000.000	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	465.242.477	3.962.950.415	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	1 unit	14 unit	35.000.000	3.385.540.000	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja kerja, kursi, lemari	42 unit	44 unit	121.557.350	176.847.350	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan AC, komputer, printer, kalkulator dan laptop	29 unit	37 unit	230.270.880	322.148.818	
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	16 unit	16 unit	78.414.247	78.414.247	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	804.335.396	804.335.396	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	12 Bulan	297.879.996	297.879.996	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa yang dibayarkan kepada pegawai non PNS	481 OB	481 OB	506.455.400	506.455.400	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.160.580.000	1.250.017.000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terawatnya Kendaraan dinas roda dua dan roda empat	23 Unit	23 Unit	799.600.000	717.060.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas
			Target 2022		Pagu Indikatif		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya peralatan kerja	65 Unit	65 Unit	60.980.000	63.555.000	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung kantor	1 unit	1 unit	300.000.000	469.402.000	
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	361.167.696.078	360.385.780.793	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				4.037.847.552	3.387.747.552	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dilaksanakannya Penyusunan KUA dan PPAS APBD TA.2022 Kab.Langkat	300 buku	300 buku	247.472.719	247.472.719	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dilaksanakannya Penyusunan KUA dan PPAS P.APBD TA.2022 Kab.Langkat	300 buku	300 buku	245.625.800	245.625.800	
5 02 02 2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dilaksanakannya Verifikasi RKA-SKPD	54 Dkumen	54 Dkumen	131.308.145	13.108.145	
5 02 02 2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dilaksanakannya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	606.366.050	74.466.050	
5 02 02 2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dilaksanakannya Verifikasi DPA-SKPD	54 Dokumen	54 Dokumen	265.323.653	265.323.653	
5 02 02 2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dilaksanakannya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	645.173.080	645.173.080	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dilaksanakannya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	350 Buku	350 Buku	940.509.645	940.509.645	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dilaksanakannya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	500 Buku	500 Buku	956.068.460	956.068.460	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	100%	1.122.947.876	1.836.934.366	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya pengelolaan kas daerah	12 Buku	12 Buku	90.386.480	184.086.480	
5 02 02 2.02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tertib anggaran kas dan penerbitan SPD pada SKPD	54 OPD	54 OPD	38.037.690	50.037.690	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas
			Target 2022		Pagu Indikatif		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	10 Laporan	10 Laporan	159.947.771	203.347.771	
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak	2 Dokumen	2 Dokumen	160.016.875	233.956.875	
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya laporan data penerimaan dan pengeluaran kas	54 OPD	54 OPD	202.249.500	293.866.250	
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota	Terciptanya sumber daya manusia yang mengerti tentang sistem dan prosedur keuangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	472.309.560	871.639.300	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	100%	588.812.895	516.231.995	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Perbup dan Perda	600 Buku	600 Buku	383.796.780	348.155.880	
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah	Tersedianya Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	150.653.977	150.653.977	
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan Belanja SKPD dan Kabupaten	200 Buku	200 Buku	54.362.138	17.422.138	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	355.418.087.755	354.644.866.880	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas
			Target 2022		Pagu Indikatif		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5 02 02 2.04	08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus	240 Desa	240 Desa	339.632.768.500	339.632.768.500			
5 02 02 2.04	09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan dana darurat dan mendesak	3 Kegiatan	3 Kegiatan	11.128.741.320	10.355.520.445			
5 02 02 2.04	10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	240 Desa	240 Desa	4.656.577.935	4.656.577.935			
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	100%	886.806.087	910.550.587			
5 02 03 2.01	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	886.806.087	910.550.587			
5 02 03 2.01	01 Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya dokumen standar satuan harga	1 Dokumen	1 Dokumen	225.194.527	187.189.027			
5 02 03 2.01	07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengamanan aset pemda dan terlaksananya pembuatan sertipikat tanah milik pemda	200 Sertifikat	200 Sertifikat	337.158.390	377.158.390			
5 02 03 2.01	08 Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemutakhiran data aset	5 Dokumen	5 Dokumen	78.271.055	78.271.055			
5 02 03 2.01	11 Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan BMD	54 OPD	54 OPD	246.182.115	267.932.115			

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

1. **Kebutuhan anggaran**

Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional. Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaikan.

2. **Kaidah Pelaksanaan**

Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

3. **Rencana lanjutan**

Rencana selanjutnya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD dari Tahun 2019 sampai 2024.

Pengusulan Perubahan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2022 sesuai kebutuhan yang telah direncanakan tahun 2022 dan Perubahan Anggaran pada perencanaan tahun 2022 ini sebesar Rp 81.204.820.959,-.

Untuk mencapai program yang ada sesuai dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakelola yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat tahun ini selain merupakan jabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.